

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Judul : Menkominfo tegaskan tidak ada pajak judi

Tanggal: Rabu, 13 September 2023

Surat Kabar : Media Indonesia

Halaman : 6

Menkominfo Tegaskan tidak Ada Pajak Judi

MENTERI Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan tidak akan ada pajak judi online alias judi daring. Pernyataan tersebut sekaligus membantah adanya usulan atau rencana mengenakan pajak dalam praktik judi daring.

"Enggaklah, yang penting kita berantas dulu judinya," ucapnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Budi menekankan pemerintah tegas dalam memerangi perjudian. Kemenkominfo yang menjadi salah satu garda terdepan memberantas judi daring terus aktif memblokir situs atau laman judi daring.

"Kita blokir. Pemerintah tegas judi dan perjudian itu dilarang dan tindakan ilegal," tegas Budi. Menurut dia, banyak masukan yang diterimanya sehingga memberantas judi sudah menjadi bagian penting dalam program pemerintah. Dia tidak menepis salah satu praktik perjudian pernah dilegalkan pada masa Orde Baru, tapi hal itu tidak diperbolehkan lagi.

"Banyak masukan, nanti kita berantas dulu," cetusnya.

Usulan untuk menarik pajak terhadap judi daring disebut datang dari Budi sendiri. Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Senin (4/9), ia mengatakan Indonesia merugi lantaran tidak menerapkan pajak pada judi daring, padahal negara-negara di ASEAN telah menerapkan kebijakan itu.

Hal itu sontak menuai polemik karena dinilai melegalkan judi dan menyalahi aturan perundang-undangan. Namun, Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik Usman Kansong mengatakan ada kesalahpahaman persepsi atas pernyataan Menkominfo.

Menurut Usman yang juga hadir dalam RDP dengan DPR tersebut, Menkominfo mengungkapkan bahwa di ASEAN banyak negara yang melegakan judi, baik secara parsial maupun keseluruhan. Menkominfo sendiri menambahkan dalam pembicaraan tersebut bahwa ia hanya bercerita soal pajak judi dan bukan ingin mempromosikan atau mendorong legalisasi di Indonesia.

"Tidak (mempromosikan judi online), kata Pak Menteri. 'Tugas saya sebagai Menkominfo adalah memberantas judi online dengan melakukan take down'," ungkap Usman menirukan apa yang disampaikan Menkominfo.

Usman menegaskan untuk bisa dipajaki, suatu usaha harus legal, sedangkan perjudian apa pun bentuknya terlarang di negeri ini. (Sru/Ifa/P-2)